

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada rumusan masalah mengenai bagaimana tata kelola kehumasan dalam memproduksi konten di Istana Kepresidenan Yogyakarta, serta hasil temuan dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses produksi konten kehumasan dikelola melalui mekanisme internal yang terstruktur dan saling berkaitan. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan fungsi *Planning* (perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan) sebagai satu kesatuan alur pengelolaan komunikasi, meskipun dalam praktiknya berlangsung secara fleksibel sesuai dengan kondisi kelembagaan.

Perencanaan produksi konten dilakukan dengan memperhatikan arahan pimpinan, nomenklatur resmi, etika komunikasi publik, serta pertimbangan momentum publikasi. Pengorganisasian berlangsung melalui pembagian peran dan koordinasi internal yang adaptif, sehingga setiap tahapan produksi dapat berjalan sesuai kebutuhan institusi. Pada tahap pelaksanaan, tim kehumasan menyesuaikan proses produksi dengan dinamika kegiatan serta ketentuan protokoler dan keamanan yang berlaku. Pengawasan dilakukan secara berlapis melalui proses pengecekan, revisi, persetujuan pimpinan, serta evaluasi pascapublikasi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa produksi konten kehumasan berada dalam sistem pengendalian komunikasi yang memastikan akurasi pesan, konsistensi informasi, serta kesesuaian dengan kebijakan institusi.

Berdasarkan analisis melalui fungsi POAC, tata kelola kehumasan dalam memproduksi konten di Istana Kepresidenan Yogyakarta memperlihatkan adanya sistem pengelolaan komunikasi yang terarah, terkoordinasi, dan bertanggung jawab secara institusional. Tata kelola tersebut tidak hanya mengatur alur kerja produksi, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme

pengendalian pesan dalam komunikasi publik pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyusun beberapa saran akademis dan praktis.

5.2.1. Saran Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kehumasan, khususnya terkait tata kelola produksi konten kehumasan pemerintah yang ditinjau melalui fungsi manajemen POAC. Berdasarkan temuan penelitian yang tidak hanya menunjukkan pola pengelolaan, tetapi juga mengungkap adanya hambatan dalam pelaksanaannya, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan fokus kajian pada aspek hambatan dan strategi penanganannya dalam tata kelola kehumasan pemerintah. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan kuantitatif, misalnya dengan mengukur tingkat penerapan, konsistensi, atau efektivitas fungsi POAC. Selain itu, perluasan objek kajian pada instansi pemerintah dengan tingkat kewenangan yang berbeda diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai variasi tata kelola kehumasan pemerintah.

5.2.1. Saran Praktis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai gambaran mengenai tata kelola produksi konten kehumasan di lingkungan lembaga negara, khususnya di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Pemetaan alur kerja, pembagian peran, serta mekanisme pengendalian yang teridentifikasi dalam penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan rujukan internal bagi lembaga dalam memahami praktik pengelolaan produksi konten kehumasan yang telah berjalan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi konseptual bagi lembaga terkait dalam menjaga konsistensi pelaksanaan produksi konten kehumasan agar tetap selaras

dengan kerangka kebijakan, kewenangan institusional, serta ketentuan yang berlaku.

